# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel moderasi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2019–2025, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Opini Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Opini Audit yang diperoleh pemerintah daerah belum dapat mencerminkan tinggi rendahnya Kinerja Pemerintah Daerah, karena Opini Audit lebih menitikberatkan pada kewajaran penyajian laporan keuangan dibandingkan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

2. Temuan Audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa banyak atau sedikitnya Temuan Audit yang diungkapkan oleh BPK belum mampu menjelaskan tingkat kinerja pemerintah daerah, karena kinerja juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar hasil pemeriksaan keuangan.

3. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah tidak mampu memoderasi pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Tinggi

rendahnya tingkat Kemandirian Keuangan Daerah tidak mengubah hubungan antara Opini Audit dan Kinerja Pemerintah Daerah, sehingga perolehan Opini Audit tidak menjadi lebih berpengaruh terhadap kinerja meskipun pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan yang lebih mandiri.

4. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah tidak mampu memoderasi pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah secara mandiri tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

## B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, terdapat implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

   Pemerintah daerah perlu memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta pelayanan publik, tidak hanya berfokus pada pencapaian opini audit yang baik atau meminimalkan temuan audit BPK. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan terus meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah melalui

optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

2. Bagi Pemerintah Pusat

   Pemerintah pusat perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah, tidak hanya pada aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi terhadap sistem penilaian kinerja pemerintah daerah perlu terus dilakukan agar penilaian kinerja tidak hanya berorientasi pada aspek kepatuhan administrasi dan pelaporan keuangan, tetapi juga mampu menggambarkan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara lebih komprehensif.

## C. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, terdapat saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

   Pemerintah daerah disarankan untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian opini audit yang baik, tetapi juga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah melalui

optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

*2. Bagi Pemerintah Pusat*

Pemerintah pusat disarankan untuk terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah, baik melalui peningkatan kualitas sistem audit maupun evaluasi kinerja pemerintah daerah secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penyempurnaan kebijakan yang mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan dan kemandirian keuangan daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara lebih efektif dan akuntabel.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja pemerintah daerah, seperti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan keuangan daerah, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, maupun karakteristik pemerintah daerah lainnya. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian serta menambah periode pengamatan agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah.